

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring dengan perkembangan teknologi dan ekonomi, laporan keuangan berkembang sangat pesat terutama dalam penyajian informasi. Dalam hal ini, perkembangan peran pelaporan keuangan pemerintahan di Indonesia ditandai dengan menguatnya transparansi dan akuntabilitas. Transparansi adalah pemberian informasi yang terbuka bagi pemakai laporan keuangan (Baldric Siregar, 2017). Sedangkan, akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya (Lukito Penny Kusumastuti, 2014). Hal tersebut merupakan salah satu pertanggungjawaban atas program kegiatan entitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 mengenai Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Yosefrinaldi, 2013).

Dalam penyajian laporan keuangan, informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan aktivitas operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas, dan efisiensi suatu entitas pelaporan. Laporan

keuangan adalah hasil atau kinerja dari pihak pengelola suatu entitas dalam usaha pertanggungjawaban penggunaan sumber daya dan sumber dana yang dipercayakan kepada pihak pengelola (Ilham Satria, 2016). Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Sehingga, Untuk mewujudkan akuntabilitas publik diperlukan suatu laporan keuangan yang berkualitas (Wijayanti, 2017).

Kualitas laporan keuangan merupakan tolak ukur baik atau tidaknya atas pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah (Yuwita dan Suhesti, 2019). Kualitas laporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan menyediakan berbagai informasi laporan keuangan (Abdul Hapiz Tanjung, 2012). Oleh karena itu, untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan suatu karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Baldric Siregar, 2017). Selain itu, laporan keuangan pemerintah daerah yang memiliki kualitas baik dapat dilihat dari opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku badan yang memeriksa dan menilai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Yuwita dan Suhesti, 2019).

Adapun fenomena khusus terkait kualitas laporan keuangan yaitu laporan keuangan yang tidak relevan dan tidak andal karena tidak didukung dengan perhitungan yang akurat dan rincian yang lengkap sehingga tidak diyakini atau diverifikasi kewajarannya. Hal ini dilansir pada tanggal 31 Mei 2018, Pemerintah Kota Bandung gagal meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait laporan keuangan dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK. Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat menyatakan bahwa ada beberapa permasalahan diantaranya kontrak penyewaan tanah tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak ada perhitungan akurat mengenai piutang penyewaan tanah, dan utang jangka pendek yang tidak dilengkapi rincian yang dibutuhkan sehingga tidak dapat diverifikasi kewajarannya (Arman Syifa, 2018).

Adapula fenomena khusus terkait kualitas laporan keuangan yaitu laporan keuangan yang disajikan tidak andal. Yang dilansir pada tanggal 2 November 2018, Wali Kota Bandung optimis meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK setelah banyak melakukan perbaikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sebelumnya belum disajikan secara wajar dan aspek material sesuai Standar Akuntansi Pemerintah serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum diungkap secara memadai dan sesuai undang-undang yang berlaku (Oded M Danial, 2018).

Selanjutnya fenomena terkait kualitas laporan keuangan yaitu laporan keuangan yang tidak relevan karena tidak didukung dengan data yang lengkap dan akurat. Yang dilansir pada tanggal 20 Desember 2019, yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mendapat predikat opini Wajar Dengan

Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018. Menurut Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung Barat terdapat permasalahan yang ditemukan dalam laporan keuangan diantaranya pada akun aset yang tidak didukung dengan rincian aset yang memadai sehingga keberadaan fisiknya sulit untuk ditelusuri, pencatatan aset yang belum lengkap dan akurat, aset tidak didukung dengan data yang handal yang mudah ditemukan, aset berupa tanah yang belum bersertifikat, aset dikuasai pihak lain, dan aset yang tidak diketahui keberadaannya (Asep Dedi, 2019).

Dari fenomena yang terjadi di atas bahwa kualitas laporan keuangan di Indonesia masih dinilai sangat rendah, hal ini disebabkan karena laporan keuangan yang disajikan tidak didukung dengan perhitungan yang akurat sehingga tidak diyakini kewajarannya dan tidak didukung dengan rincian yang lengkap sehingga tidak dapat diverifikasi kewajarannya. Selain itu pun laporan keuangan pemerintah masih belum disajikan secara wajar dan aspek material berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah.

Tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah diantaranya dapat dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (Komang, Ni, dan Gede, 2017). Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual telah mempunyai landasan hukum yang mampu memberikan hasil lebih berkualitas terhadap laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan berdasarkan basis akrual mengakui pengaruh transaksi atau kejadian tersebut saat terjadi untuk tujuan pelaporan (Mursyidi, 2013). Sehingga

hal ini, pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. Manfaat dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual mempermudah pemerintah dalam melakukan evaluasi pada laporan keuangan juga evaluasi pada kinerja pemerintah terutama terhadap sumber daya (Erlita, Sifrid, dan Sherly, 2015). Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan (Erlina Rasdianto, 2013).

Akuntansi berbasis akrual diterapkan untuk menyediakan informasi yang lebih dalam menilai akuntabilitas pengelolaan sumber daya, menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas, serta membuat keputusan (Baldrick Siregar, 2017). Selain itu, penerapan akuntansi berbasis akrual digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan dalam pengelolaan laporan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah (Yuli Nurhayati, Dkk., 2019). Maka indikator dalam penerapan akuntansi berbasis akrual terdapat 2 prinsip yaitu prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan beban (Weygandt, Kimmel, and Kieso, 2015). Dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual mampu membawa beberapa perubahan mendasar dalam tata kelola keuangan negara. Namun, dalam penerapan SAP berbasis akrual tentunya menjadi tugas berat bagi pemerintah daerah. Hingga kini belum sepenuhnya paham akan penerapan SAP berbasis akrual tersebut, meskipun semua telah menerapkan tetapi dalam implementasinya masih banyak permasalahan (Dewi Aulia, 2017).

Adapun fenomena khusus terkait penerapan akuntansi berbasis akrual yang masih terkendala sehingga terdapat permasalahan dalam laporan keuangan yang disajikan. Seperti yang dilansir pada tanggal 1 Juni 2018, Kepala BPK RI perwakilan Jawa Barat menyatakan bahwa LKPD Tahun Anggaran 2017 telah disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah yaitu akrual basis. Namun, masih terdapat permasalahan terkait dalam penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah (Arman Syifa, 2018).

Dari fenomena tersebut menyatakan bahwa dalam penerapan akuntansi berbasis akrual masih belum memadai, karena masih terdapat permasalahan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dalam hal ini laporan keuangan berbasis akrual belum disajikan dengan baik dan berkualitas. Maka, dalam hal ini penerapan akuntansi berbasis akrual harus dilakukan sesuai dengan standar dan kebijakan akuntansi yang telah ditentukan.

Untuk dapat menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas diperlukan suatu sistem informasi akuntansi yang andal dalam mengolah data dan transaksi sehingga informasi yang dihasilkan dapat berguna dalam pengambilan keputusan (Lilis Puspitawati dan Novi Indriani, 2019). Sistem informasi akuntansi adalah suatu kumpulan dari berbagai macam sumber daya, seperti manusia dan juga peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan juga data lainnya menjadi sebuah informasi yang berguna bagi user dan penggunanya (Bodnar & Hopwood, 2010). Sistem akuntansi dirancang sedemikian rupa oleh

suatu organisasi atau entitas sehingga dapat memenuhi fungsinya yaitu menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami dengan sistem informasi akuntansi yang layak dapat menghasilkan suatu laporan yang mampu memberikan berbagai informasi yang berguna bagi pihak-pihak pengambil keputusan (Indana Zulfah, dkk. 2017).

Suatu sistem informasi akuntansi dapat dikatakan berkualitas apabila sistem atau komponen baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan dan berkerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan (Azhar Susanto, 2017). Kualitas sistem informasi akuntansi memungkinkan dalam memperoleh laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kinerja pada pihak pengambilan keputusan. Sebuah sistem informasi yang berkualitas memiliki karakteristik yaitu keandalan, fleksibel, ketersediaan, dan keamanan (Romney dan Steinbart, 2017). Selain itu, pengukuran terhadap kualitas sistem informasi akuntansi dapat diukur dengan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi tersebut dan dampak penggunaan sistem informasi akuntansi terhadap kepuasan penggunanya perlu dilakukan untuk mengevaluasi dan memelihara keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi yang dapat meningkatkan kinerja penggunanya agar pelaporan pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan baik (Taufik Saleh, Dkk., 2012).

Adapun fenomena khusus terkait kualitas sistem informasi akuntansi yaitu sarana pendukung yang belum lengkap pada software sistem informasi. Dilansir pada 26 September 2017, Pemerintah Kota Bandung telah memiliki 394 aplikasi

Smart City yang dibangun dengan tujuan untuk memudahkan pekerjaan seluruh SKPD. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung menyatakan bahwa aplikasi yang operasional utuh sebanyak 239, sisanya sebanyak 122 aplikasi dalam proses pengembangan. Sedangkan 33 aplikasi tidak operasional karena adanya perubahan platform, update sistem, dan sarana pendukung yang belum lengkap. Sehingga dalam penyajian data atau informasi tidak dapat disajikan secara lengkap dan akurat (Ahyani Raksanagara, 2017).

Selanjutnya fenomena terkait kualitas sistem informasi akuntansi yaitu sistem informasi akuntansi yang tidak fleksibel dalam penggunaannya. Dilansir pada tanggal 4 April 2018 yang disampaikan oleh ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan bahwa masih ada sistem informasi yang belum terintegrasi sehingga tidak dapat menyesuaikan dengan baik dan lancar ketika ada perubahan yang terjadi dalam pengolahan data (Moermahadi Soerja Djanegara, 2018).

Adapula fenomena khusus terkait kualitas sistem informasi akuntansi di Indonesia mengenai ketersediaan sistem yang masih sulit diakses. Dilansir pada tanggal 7 Desember 2016 dimana Kepala Dinas Diskominfo Kota Bandung menyatakan bahwa dalam mewujudkan Bandung Smart City seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung juga harus berpartisipasi dengan mengoptimalkan ratusan aplikasi sistem informasi yang menggunakan teknologi yang sekarang belum memiliki infrastruktur atau sumber daya yang memadai sehingga sulit untuk diakses dalam pengoperasianya (Asep Cucu Cahyadi, 2016).

Serta fenomena yang terkait kualitas sistem informasi akuntansi di Indonesia yaitu sistem informasi yang digunakan mudah di bobol dan bocor. Hal ini dilansir pada tanggal 9 November 2017, menurut Pakar Telekomunikasi ITB bahwa sistem informasi pemerintah cenderung kurang aman. Seringkali data pemerintah mudah dibobol dan bocor kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan data tahun 2015, Indonesia menempati peringkat 29 dalam kasus serangan terhadap jaringan, setahun kemudian pada 2016 naik peringkatnya menjadi ke-7 di dunia akibat serangan itu (Tutun Juhana, 2017).

Dari fenomena yang terjadi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi yang berkualitas sangat dibutuhkan. Diantaranya sistem informasi akuntansi yang berkualitas harus terjamin keandalannya agar dapat memproses data secara akurat dan lengkap. Selanjutnya, sistem informasi yang digunakan itu harus fleksibel yang artinya sistem tersebut harus terintegrasi, mampu memenuhi atau menyesuaikan kebutuhan serta perubahan sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar dalam penggunaannya. Dan suatu sistem informasi akuntansi yang berkualitas harus memiliki karakteristik ketersediaan yang artinya sistem tersebut tersedia untuk di akses oleh pengguna. Hal terakhir yang menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi tersebut berkualitas adalah keamanan sistem yang baik yang berarti sistem yang digunakan tidak mudah dibobol dan bocor kepada pihak yang tidak bertanggungjawab.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Nyoman Triyadi Agustiawan dan Ni Ketut Rasmini (2016) dengan judul Pengaruh Sistem Berbasis Akrua, TI, dan SPIP Pada Kualitas

Laporan Keuangan Dengan Kompetensi SDM Sebagai Moderasi, penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian Rahmad Efendi, Fajar Gustiawaty Dewi, dan Rindu Rika Gamayuni (2018) dengan judul *Usefulness Analysis Of Accrual Based Accounting Information On Local Government Financial Statement: A Qualitative Study*, dan penelitian yang telah dilakukan oleh Yuli Nurhayati, Ronal Aprianto, dan Reni Anggraini (2019) dengan judul Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrua dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, yang membuktikan secara empiris bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Adapula penelitian yang telah dilakukan oleh Amos Iorcher Ganyam and John Ayoor Ivungu (2019) dengan judul *Effect Of Accounting Information On Financial Performance Of Firms: A Review Of Literature*, penelitian Azhar Susanto (2017) dengan judul *The Influence of Accounting Information System Quality to Accounting Information Quality and Its Implications to The Good Study Program Governance*, dan penelitian Lilis Puspitawati, Hilmi, dan Nabilah Andri Daneswari (2020) dengan judul *Prediction Model Of Internal Control System And Accounting Information Systems And Its Impact To The Quality Of The Local Government Financial Statement (Survey of the City of Bandung Financial and Asset Management Agency)* yang membuktikan secara empiris bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang, konsep, fenomena, dan hasil penelitian terdahulu yang dinyatakan sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN KUALITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dari itu peneliti dapat menyimpulkan identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Laporan keuangan dinilai tidak relevan, karena tidak ada perhitungan yang akurat dan tidak dilengkapi rincian yang dibutuhkan sehingga tidak dapat diverifikasi kewajarannya.
2. Laporan keuangan dinilai tidak andal, karena belum disajikan secara wajar dan aspek material sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
3. Penerapan akuntansi berbasis akrual masih belum memadai karena terdapat permasalahan terkait penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah.
4. Sistem informasi akuntansi yang tidak handal karena sarana pendukung yang belum lengkap sehingga data atau informasi yang dihasilkan tidak akurat dan lengkap.

### **1.3 Rumusan Masalah**

1. Seberapa besar pengaruh penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Seberapa besar pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.

### **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti secara empiris terkait pengaruh penerapan akuntansi berbasis akrual dan kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.

#### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis yang akan dikaji, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.

### **1.5 Batasan Masalah Penelitian**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan, sehingga tujuan penelitian ini tercapai. Batasan

masalah ini juga digunakan karena adanya pandemic COVID-19, Pemerintah menghimbau agar seluruh masyarakat Indonesia untuk membatasi aktivitas di luar rumah selama COVID-19. Hal tersebut menyebabkan peneliti kesulitan untuk melakukan penelitian, sehingga dalam penelitian ini hanya 25 responden.

## **1.6 Kegunaan Penelitian**

### **1.6.1 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memecahkan masalah mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual yang belum memadai, kualitas sistem informasi akuntansi digunakan tidak handal dan kualitas laporan keuangan yang disajikan tidak relevan, serta dapat memberikan solusi dan data sebagai tambahan informasi yang bermanfaat mengenai pengaruh penerapan akuntansi berbasis akrual dan kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.

### **1.6.2 Kegunaan Akademis**

Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dibuktikan secara empiris seberapa besar pengaruh penerapan akuntansi berbasis akrual dan kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan melalui pengujian hipotesis yang dilakukan. Dengan adanya bukti empiris tersebut diharapkan dapat memperkuat teori dan

penelitian sebelumnya yang sudah dinyatakan dan dikemukakan oleh para ahli sebelumnya.

2. Dapat menyusun karya ilmiah dengan menggunakan teori yang sudah dipelajari dan mengacu kepada penelitian-penelitian sebelumnya.
3. Dapat dijadikan sebagai sebuah acuan terhadap pengembangan dan dijadikan sebuah referensi untuk melakukan penelitian agar penelitian selanjutnya lebih baik atau lebih berkembang.